

BAB II

SARANA PRASARANA PERMUKIMAN, LOKASI, DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

2.1 Pengertian Permukiman

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dimaksud dengan permukiman yaitu bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Sedangkan kawasan permukiman yaitu bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Berdasarkan asal usul terbentuknya, permukiman terbagi menjadi dua yaitu permukiman terencana dan permukiman tak terencana. Permukiman terencana merupakan suatu area tempat tinggal yang dirancang oleh seseorang. Permukiman ini pada umumnya berbentuk grid, lingkaran, atau poligon dengan sirkulasi jalan yang berbentuk radial. Sedangkan permukiman tak terencana yaitu permukiman yang terbentuk dengan sendirinya dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Pada umumnya, permukiman jenis ini memiliki bentuk yang tidak beraturan dan memiliki sirkulasi jalan yang berliku (Kostof, 1991:43).

2.2 Sarana Prasarana Permukiman

Prasarana menurut UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar pemenuhan tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Sedangkan sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Sarana permukiman terdiri dari sarana pemerintahan dan pelayanan umum, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan dan niaga, serta ruang terbuka, taman, dan lapangan olahraga. Sedangkan untuk prasarana permukiman terdiri dari jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan air bersih, air limbah/sanitasi, persampahan, jaringan listrik, dan jaringan telepon.

2.3 Teori Lokasi

Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang (*spatial order*) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha/kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial (Tarigan, 2006 : 77).

Berdasarkan teori tempat pusat (*Central Place Theory*) yang dikembangkan oleh Christaller, pelayanan jasa (jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pemenuhan kebutuhan, serta jasa pemerintahan dan pelayanan umum) di suatu tempat memiliki hirarki tertentu. Suatu tempat dengan hirarki teratas mampu memenuhi kebutuhan di suatu tempat dengan hirarki di bawahnya. Di kota besar cenderung mempunyai jenis pelayanan jasa yang lebih banyak dan dengan skala pelayanan yang besar, namun sebaliknya jika di kota kecil maka jenis pelayanan jasanya lebih sedikit dan dengan skala pelayanan yang kecil pula. Sebagai contoh, misalnya di tingkat kabupaten, pelayanan kesehatan disediakan oleh rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan yang beragam dan dengan skala pelayanan lebih besar. Sedangkan pada tingkat desa, pelayanan kesehatan disediakan oleh puskesmas, namun pelayanannya sedikit terbatas dan skala pelayanannya lebih kecil, hanya untuk desa tersebut dan wilayah sekitarnya (Djojodipuro, 1992).

Dalam suatu pelayanan jasa, pendistribusian lokasi tersebut memerlukan pertimbangan seperti ambang penduduk dan jangkauan pasar yang dijabarkan dalam teori Palander (Djojodipuro, 1992). Menurut teori Palander, ambang penduduk (*threshold population*) adalah jumlah penduduk minimum untuk dapat mendukung suatu penawaran akan jasa. Sedangkan jangkauan pasar suatu kegiatan jasa adalah jarak yang seseorang bersedia untuk menempuhnya untuk mendapatkan pelayanan jasa yang bersangkutan. Namun apabila lebih jauh dari jarak ini, orang yang bersangkutan akan mencari tempat lain yang lebih dekat untuk memenuhi kebutuhan akan jasa yang sama. Jangkauan pasar juga dipengaruhi oleh waktu yang terbuang dan biaya yang dikeluarkan untuk mencapai pasar tersebut.

2.4 Standar Pelayanan Sarana Prasarana Permukiman

Dalam penelitian ini terkait dengan standar pelayanan sarana prasarana permukiman, pedoman yang digunakan yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan dan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2011. Berikut ini merupakan standar pelayanan minimal mengenai sarana prasarana permukiman yang dirangkum dalam tabel II.1 Standar Pelayanan Sarana Prasarana Permukiman.

Tabel II. 1 Standar Pelayanan Sarana Prasarana Permukiman

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Standar Pelayanan
1.	Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor Kelurahan untuk setiap 2.500 penduduk - Pos hansip untuk setiap 2.500 penduduk - Balai pertemuan untuk setiap 2.500 penduduk
2.	Sarana Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - TK untuk setiap 1.250 penduduk dengan radius pencapaian 500 meter - SD untuk setiap 1.600 penduduk dengan radius pencapaian 1000 meter - SLTP untuk setiap 4.800 penduduk dengan radius pencapaian 1000 meter - SLTA untuk setiap 4.800 penduduk dengan radius pencapaian 3000 meter
3.	Sarana Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Posyandu untuk setiap 1.250 jiwa dengan radius pencapaian 500 meter - Balai pengobatan untuk setiap 2.500 jiwa dengan radius pencapaian 1000 meter - BKIA/RS Bersalin untuk setiap 10.000-30.000 jiwa dengan radius pencapaian 4000 meter - Puskesmas untuk setiap 30.000 jiwa dengan radius pencapaian 1.500 meter - Tempat praktik dokter untuk setiap 5000 jiwa dengan radius pencapaian 1.500 meter - Bersih, mudah dicapai, tenang, jauh dari sumber penyakit, sumber bau/sampah, dan pencemaran lainnya
4.	Sarana Peribadatan	<ul style="list-style-type: none"> - Mushola / langgar untuk setiap 250 jiwa dengan radius pencapaian 100 meter - Masjid untuk setiap 2.500 jiwa dengan radius pencapaian 1000 meter - Sarana ibadah lain menyesuaikan dengan kondisi setempat - Bersih, tenang, teduh, mudah dicapai
5.	Sarana Perdagangan dan Niaga	<ul style="list-style-type: none"> - Toko/warung untuk setiap 250 penduduk dengan radius pencapaian 300 meter - Pertokoan untuk setiap 5.000 penduduk dengan radius pencapaian 2.000 meter - Berada di tengah kelompok tetangga, dapat merupakan bagian dari sarana lain
6.	Sarana Ruang Terbuka, Taman, dan Lapangan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap unit RT berpenduduk 250 jiwa dibutuhkan minimal 1 taman yang dapat memberikan kesegaran udara sekaligus tempat bermain anak

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Standar Pelayanan
		<ul style="list-style-type: none"> - Setiap unit RW berpenduduk 2.500 jiwa diperlukan minimal satu daerah terbuka berupa taman yang berfungsi sebagai tempat bermain anak dan lapangan olahraga dengan radius pencapaian 1.000 meter - Setiap unit kelurahan berpenduduk 30.000 jiwa diperlukan taman dan lapangan olahraga untuk melayani kebutuhan kegiatan penduduk di area terbuka - Setiap unit kecamatan berpenduduk 120.000 jiwa harus memiliki minimal satu ruang terbuka yang berfungsi sebagai kuburan/pemakaman umum - Menyediakan jalur hijau yang berfungsi sebagai filter dari polusi
7.	Jaringan Jalan	Jalan yang disediakan harus dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan. Selain itu harus didukung dengan prasarana pendukung jalan seperti perkerasan jalan, trotoar, drainase, rambu lalu lintas, parkir, dan lain-lain
8.	Jaringan Drainase	Tidak ada genangan banjir >10 Ha. Apabila ada genangan, tinggi genangan rata-rata >30 cm dan dengan lama genangan >2 jam. Frekuensi kejadian banjir >2 kali setahun
9.	Jaringan Air Bersih	<ul style="list-style-type: none"> - 55-75 % penduduk terlayani - Kualitas air memenuhi standar air bersih (tidak berbau, berwarna, dan berasa)
10.	Jaringan Air Limbah	<ul style="list-style-type: none"> - 80% jumlah penduduk memiliki sarana sanitasi yang terdiri dari toilet/jamban/MCK dan <i>septic tank</i>
11.	Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat kapasitas pewadahan tersedia - Pengumpulan dan pengangkutan sampah dilakukan secara regular - Tidak ada penanganan akhir sampah secara <i>open dumping</i> - Tidak ada pembuangan sampah secara liar
12.	Jaringan Listrik	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap lingkungan permukiman harus mendapatkan daya listrik dari PLN atau sumber lain - Setiap unit rumah tangga harus dapat dilayani daya listrik minimum 450 VA - Disediakan tiang listrik sebagai penerangan jalan yang ditempatkan pada area damija (Daerah Milik Jalan) pada sisi jalur hijau dan tidak menghalangi sirkulasi pejalan kaki - Disediakan gardu listrik yang ditempatkan pada lahan yang bebas dari kegiatan umum
13.	Jaringan Telepon	<ul style="list-style-type: none"> - Tiap lingkungan rumah perlu dilayani jaringan telepon lingkungan

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Standar Pelayanan
		- Tiang listrik ditempatkan pada area damija (Daerah Milik Jalan) pada sisi jalur hijau dan tidak menghalangi sirkulasi pejalan kaki

Sumber : - SNI 03-1733-2004, Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota
- Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2011

2.5 Tabel Kebutuhan Data

Tabel kebutuhan data merupakan daftar data yang dibutuhkan untuk analisis dalam penelitian. Penyusunan tabel kebutuhan data dilakukan agar memudahkan dalam mengumpulkan data. Berikut ini merupakan tabel kebutuhan data dari penelitian ini.

Tabel II. 2 Kebutuhan Data

No	Aspek	Nama Data	Tujuan	Unit Data	Tahun Data	Jenis Data	Bentuk Data	Teknik Pengumpulan Data	Sumber
1.	Administrasi	Batas administrasi	Ruang lingkup wilayah studi	Desa	2018	sekunder	Shapefile	- Telaah dokumen - Pemetaan	BAPPEDA
2.	Topografi	Sebaran kelereng	Kondisi kelereng wilayah studi	Desa	2018	sekunder	shapefile	- Telaah dokumen - Pemetaan	BAPPEDA
3.	Litologi	Jenis tanah	Jenis tanah wilayah studi	Desa	2018	sekunder	shapefile	- Telaah dokumen - Pemetaan	BAPPEDA
4.	Hidrologi	Jenis hidrologi	Jenis hidrologi di wilayah studi	Desa	2018	sekunder	shapefile	- Telaah dokumen - Pemetaan	BAPPEDA
5.	Penggunaan Lahan	Jenis Penggunaan Lahan	Jenis penggunaan lahan di wilayah studi	Desa	2018	- Primer - sekunder	Shapefile	- telaah dokumen - observasi	BAPPEDA
6.	Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana permukiman	Jumlah sarana dan prasarana permukiman	Desa	2018	Primer	Numerik	Observasi	Survei Lapangan

No	Aspek	Nama Data	Tujuan	Unit Data	Tahun Data	Jenis Data	Bentuk Data	Teknik Pengumpulan Data	Sumber
			di wilayah studi						
		Kondisi sarana dan prasarana permukiman	Kondisi sarana dan prasarana permukiman di wilayah studi	Desa	2018	Primer	Deskriptif	- Observasi - Kuesioner	Survei Lapangan
		Sebaran sarana dan prasarana permukiman	Sebaran lokasi sarana dan prasarana permukiman di wilayah studi	Desa	2018	Primer	- Deskriptif - Waypoint	Observasi	Survei Lapangan

Sumber : Hasil Analisis, 2019

2.4 Metodologi

Metode adalah suatu langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam laporan akhir ini akan membahas metode analisis dan metode pengumpulan data.

2.4.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau proses yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu. Data yang dikumpulkan harus benar dan sesuai dengan kondisi eksisting agar tidak terjadi kesalahan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh peneliti. Data yang didapatkan sifatnya lebih akurat, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan pembagian kuesioner dan observasi secara langsung ke wilayah studi terkait bahan penelitian.

a. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik mengumpulkan data atau informasi dengan cara memberi daftar pertanyaan yang kemudian dijawab oleh responden. Jumlah responden yang digunakan dihitung melalui teknik pengambilan sampel yang disebut *simple random sampling*. *Simple random sampling* adalah metode penarikan dari sebuah populasi dengan cara tertentu sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih (Kerlinger, 2006). Penggunaan teknik pengambilan sampel ini dikarenakan sasaran dari kuesioner ini merupakan masyarakat umum, sehingga dipilih secara acak dan setiap masyarakat memiliki peluang yang sama untuk menjadi responden. Berikut ini merupakan perhitungan untuk jumlah sampel yang digunakan.

Rumus Perhitungan *Simple Random Sampling* :

$$n = \frac{NZ^2 p (1 - p)}{Nd^2 + Z^2 p(1 - p)}$$

Keterangan:

- n = Jumlah sampel yang dikehendaki
- N = Jumlah populasi (jumlah Penduduk = 2475)
- Z = Derajat kecermatan (1,645)
- d = maksimal kesalahan (0,1)
- p = proporsi sampel (0,5)

$$n = \frac{2475 \times 1,645^2 \times 0,5 (1 - 0,5)}{2475 \times 0,1^2 + 1,645^2 \times 0,5(1 - 0,5)}$$

$$n = \frac{1674,35}{24,75 + 0,676}$$

$$n = \frac{1674,35}{25,42}$$

$$n = 65,85 \sim 66$$

Dari perhitungan tersebut, maka jumlah sampel yang digunakan untuk pembagian kuesioner yaitu sebanyak 66 sampel dengan rincian sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah sampel}}{\text{Jumlah penduduk desa}} \times \text{Jumlah penduduk per RW} = \text{sampel per RW}$$

Tabel II. 3 Jumlah sampel dirinci per RW

No RW	Jumlah sample	No RW	Jumlah sample
RW 01	7	RW 08	5
RW 02	10	RW 09	5
RW 03	8	RW 10	5
RW 04	5	RW 11	4
RW 05	4	RW 12	3
RW 06	6	RW 13	2
RW 07	1	RW 14	2

Sumber: Hasil Analisis, 2019

b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah teknik mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang diselidiki. Observasi yang dilakukan meliputi observasi terkait kondisi, lokasi, serta jumlah sarana prasarana eksisting.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui telaah dokumen dan data instansi terkait. Telaah dokumen yaitu cara yang dilakukan dengan mengumpulkan data serta menganalisis dokumen, baik itu tertulis maupun gambar. Teknik ini dapat digunakan sebelum melakukan observasi lapangan, untuk mengetahui data secara umum terkait penelitian. Data tersebut juga dapat diperoleh melalui internet. Selain telaah dokumen, pengumpulan data sekunder juga dapat dilakukan dengan mendatangi instansi terkait untuk memperoleh data secara detail.

2.4.2 Metode Analisis

Metode analisis merupakan suatu cara yang dilakukan dalam mengumpulkan data, kemudian dilakukan proses analisis terhadap data tersebut. Sedangkan metodologi penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian. Apabila metode penelitian menjadi metodologi penelitian, maka harus ada langkah tertentu dalam mengumpulkan dan mengolah data agar tidak terjadi kerancuan (Sodik dan Siyoto, 2015:99). Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif, dan analisis spasial.

1. Metode Kualitatif

Metode kualitatif adalah metode yang sifatnya deskriptif, mengacu pada data dan dasar teori sebagai bahan pendukung. Metode ini bersifat subjektif, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan. Ada 5 tahapan yang dilakukan dalam metode penelitian ini antara lain :

- Identifikasi permasalahan
- Identifikasi pertanyaan penelitian
- Mengumpulkan data yang relevan
- Melakukan penelitian
- Interpretasi hasil penelitian

Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan mengenai jumlah, kondisi, serta lokasi sarana prasarana permukiman di Desa Leyangan yang kemudian dilakukan evaluasi terkait penyediaannya berdasarkan aturan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota.

2. Metode Kuantitatif

Metode kuantitatif adalah metode yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui (Kasiram, 2008:149). Adapun tahapan yang dilakukan dalam metode penelitian ini antara lain :

- Identifikasi permasalahan
- Identifikasi variabel, hipotesis, dan pertanyaan penelitian
- Teknik sampling
- Mengumpulkan data yang relevan
- Melakukan penelitian
- Interpretasi hasil penelitian

Dalam penelitian ini, metode kuantitatif digunakan untuk menghitung proyeksi kebutuhan sarana yang disesuaikan dengan aturan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota mengenai daya layanan pada setiap sarannya.

3. Analisis Spasial

Analisis spasial digunakan dalam memetakan jangkauan pelayanan sarana di Desa Leyangan. Dalam analisis ini melalui software ArcGIS dengan menggunakan *tools* “*Network Analysis*”. Data yang diperlukan dalam “*Network Analysis*” ini yaitu shp jaringan jalan dan radius pencapaian tiap sarana yang disesuaikan dengan aturan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota.